



SURAT TUGAS
No.158/FSTD/PRODI/STG/VIII/2023

Kepala Program Studi Agroekoteknologi dan Agribisnis dengan ini menugaskan kepada:

No.	NAMA	NIDN	PRODI
1.	Ir. Yodfiatfinda, Ph.D.	0406096701	AGRIBISNIS
2.	Warid, SP., M.Si.	0307038505	AGRIBISNIS
3.	Hermawan Seftiono, S.Si, M.Si.	0319098605	ILMU TEKNOLOGI PANGAN

Untuk mengikuti dan menghadiri sebagai peserta dalam acara kegiatan “ **Forum Group Discussion (FGD) di Kementerian Desa** “ yang akan dilaksanakan pada:

Hari / Tgl : Kamis / 31 Agustus 2023.
Waktu : 09.00 – 13.00 WIB.
Tempat : Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi.
Pelaksana : Direktorat Penyerasian Pembangunan Daerah Khusus dan Ditjen PPDT.

Demikian surat tugas ini kami sampaikan, untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Jakarta, 30 Agustus 2023



Dr.Dina Nurul Fitria, S.E.,M.T.,CSCA.,CRP
Kepala Program Studi AGB & AET

Tembusan:

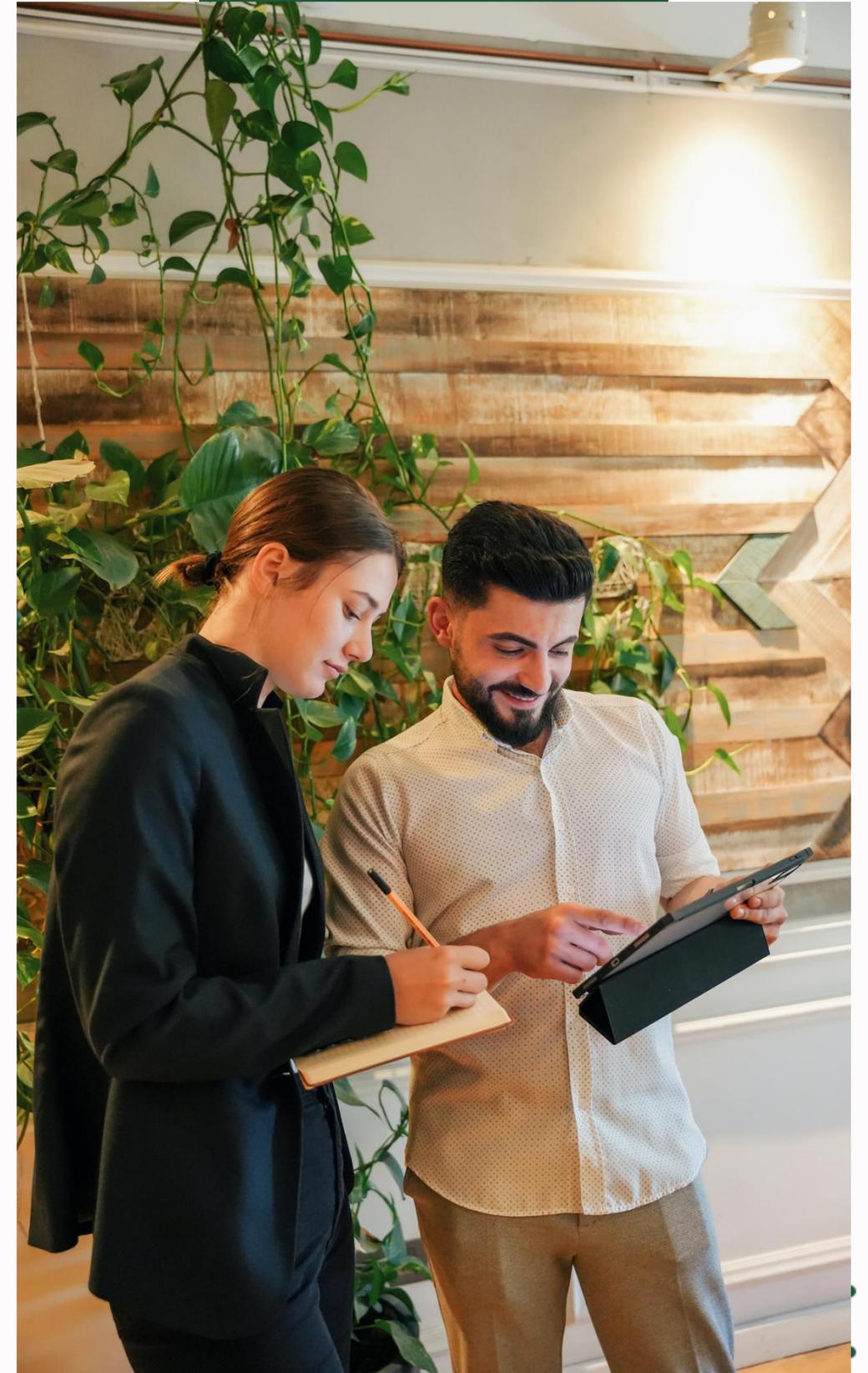
- Wakil Rektor Bidang Pembelajaran Dan Kemahasiswaan
- Dekan Fakultas FSTD
- Kepala Biro SDM



FOCUS GROUP DISCUSSION

KOLABORASI ANTAR STAKEHOLDER DALAM MENDUKUNG PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH

**DIREKTORAT PENYERASIAN PEMBANGUNAN
DAERAH KHUSUS**





DIREKTORAT PENYERASIAN PEMBANGUNAN DAERAH KHUSUS

FUNGSI

01



Penyusunan Perumusan Kebijakan di bidang penyerasian pembangunan:

- Kawasan Perbatasan
- Pulau-Pulau Kecil dan Pulau Terluar
- Kawasan Strategis

Pelaksanaan Kebijakan di bidang penyerasian pembangunan:

- Kawasan Perbatasan
- Pulau-Pulau Kecil dan Pulau Terluar
- Kawasan Strategis



02

03



Evaluasi dan Pelaporan di bidang penyerasian pembangunan:

- Kawasan Perbatasan
- Pulau-Pulau Kecil dan Pulau Terluar
- Kawasan Strategis

Pelaksanaan Urusan Ketatausahaan Direktorat



04

TUGAS

Melaksanakan penyiapan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang penyerasian pembangunan daerah khusus
Melaksanakan penyiapan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang penyerasian pembangunan daerah khusus



FOKUS AREA PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN 2020 -2024



MODEL ARCHIPOLIS



Makna Archipolis:

ARCHI

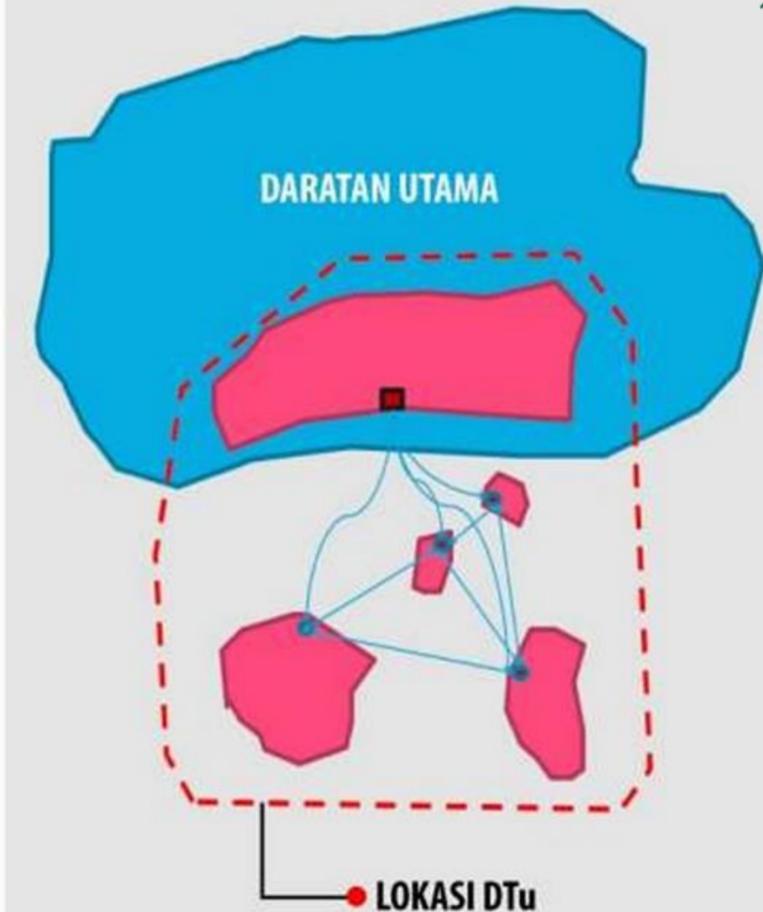
- Berasal dari kata Archipelago, sebagaimana karakter Negara Indonesia yaitu Negara Kepulauan (Archipelagic State)

POLIS

Berasal dari dua makna yaitu:

- Secara spasial dan kewilayahan yaitu 'Pole' atau Pusat, yang berarti diharapkan mampu memunculkan pusat pertumbuhan baru
- Secara Governance yaitu 'Political Identities' yaitu setiap daerah memiliki karakternya masing-masing berdasarkan pada identitas politik masyarakatnya, pada akhirnya diperlukan kebijakan asimetris didalamnya (selama ini kita kenal sebagai desentralisasi asimetris)

Model archipolis adalah sebuah model untuk manajemen wilayah terpadu berbasis kepulauan



BENTUK PENGEMBANGAN BERBASIS MODEL ARCHIPOLIS:

- Berbasis Masalah (Problem Based)
- Berbasis Pembangunan (Development Based)

METODOLOGI PENYUSUNAN PANGKALAN DATA DTU BERCIRI KEPULAUAN

514 KAB/KOTA DI INDONESIA

1. Unit administrasi kabupaten/kota yang terdiri lebih dari satu pulau dan memiliki luasan minimal 30 persen dari total luas kabupaten/kota berupa gugusan pulau kecil dan wilayah pengelolaan laut kabupaten sejauh 4 mil laut dari garis pantai pulau. (UU nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah); dan/atau
2. Unit administrasi kabupaten/kota yang memenuhi kriteria pulau kecil yaitu luas lebih kecil atau sama dengan 2000 km² (UU Nomor 27 Tahun 2007 yang sudah direvisi UU Nomor 1 Tahun 2014); dan
3. Gugusan pulau kecil yang memiliki keterkaitan geografis dan sosial-ekonomi dengan pulau induknya

DIHASILKAN 124 DAERAH KABUPATEN/KOTA BERCIRI KEPULAUAN DI INDONESIA

1. KERAWANAN KONFLIK
2. KERAWANAN PANGAN
3. RISIKO BENCANA
4. AKSESIBILITAS
5. IPM

DEVELOPMENT BASED

TIPE PEMBANGUNAN WILAYAH	DEFINISI	JML KAB/KOTA
Wilayah Siap Maju	Wilayah yang memiliki akses sangat mudah, dan sumberdaya manusia sangat tinggi	33
Wilayah Berkembang	Wilayah yang memiliki akses cukup mudah, dan sumberdaya manusia cukup tinggi	60
Wilayah Potensial	Wilayah yang memiliki akses cukup sulit, dan sumberdaya manusia cukup rendah	25
Wilayah Belum Berkembang	Wilayah yang memiliki akses sangat sulit, dan sumberdaya manusia relatif rendah	6
JUMLAH		124

Parameter:

1. Indeks Pembangunan Manusia (Raw Data: BPS, diolah ulang Tahun 2020);
2. Aksesibilitas (Raw Data: BPS dan Lembaga Terkait, diolah Tahun 2020)

PROBLEM BASED

TIPE PERMASALAHAN WILAYAH	DEFINISI	JML KAB/KOTA
Masalah Sangat Tinggi	Jika wilayah tersebut memiliki ketiga ancaman dengan kelas tinggi	44
Masalah Tinggi	Jika wilayah tersebut memiliki dua kriteria ancaman dengan kelas tinggi, dan satu kriteria ancaman dengan kelas rendah	55
Masalah Sedang	Jika wilayah tersebut memiliki satu kriteria ancaman dengan kelas tinggi, dan dua kriteria ancaman dengan kelas rendah	21
Masalah Rendah	Jika wilayah tersebut memiliki ketiga ancaman dengan kelas rendah	4
JUMLAH		124

Parameter:

1. Risiko Bencana Alam (Raw Data: Indek Risiko Bencana Indonesia / IRBI dari BNPB, diolah ulang Tahun 2020);
2. Ancaman Ketahanan Pangan (Raw Data: Badan Ketahanan Pangan, diolah ulang Tahun 2020);
3. Ancaman Konflik Sosial (Raw Data: dtaa jumlah Konflik Kemenko PMK, diolah ulang Tahun 2020).

SKALA PRIORITAS

PENENTUAN KATEGORI PADA SKALA PRIORITAS

KARAKTERISTIK DTu BERBASIS MASALAH
SEMAKIN TINGGI MASALAH,
MAKA SEMAKIN DI PRIORITASKAN



KARAKTERISTIK DTu BERBASIS PEMBANGUNAN
SEMAKIN BELUM BERKEMBANG, MAKA
SEMAKIN DI PRIORITASKAN



KARAKTERISTIK DTu BERBASIS NILAI STRATEGIS PEMBANGUNAN (PERBATASAN)
JIKA TERMASUK KAWASAN PERBATASAN,
MAKA SEMAKIN DI PRIORITASKAN



Prioritas
SEDANG
29 KAB/KOTA

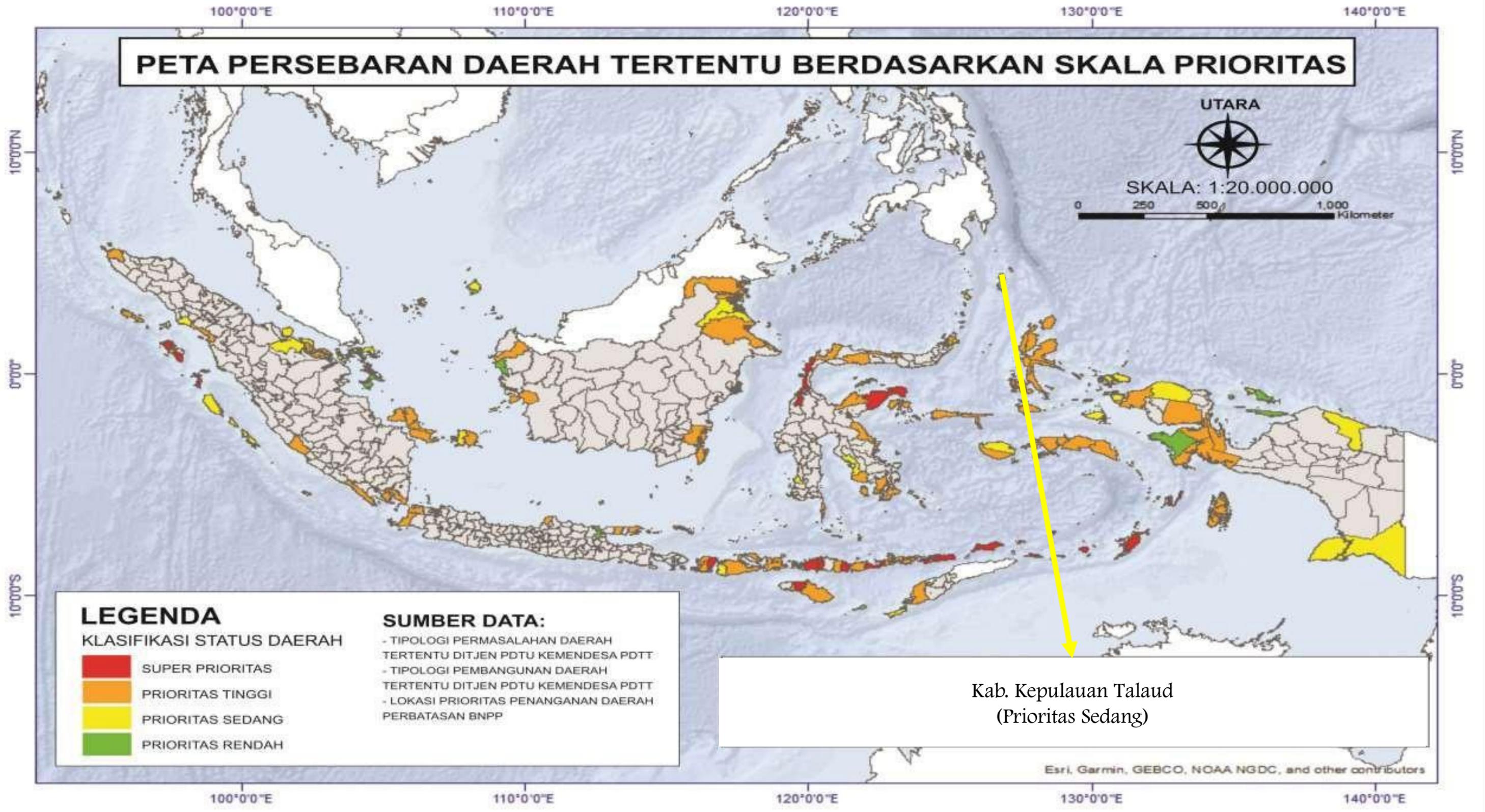
Prioritas
TINGGI
71 KAB/KOTA

Prioritas
RENDAH
9 KAB/KOTA

SUPER
Prioritas
15 KAB/
KOTA



PETA PERSEBARAN DAERAH TERTENTU BERDASARKAN SKALA PRIORITAS



LEGENDA		SUMBER DATA:	
KLASIFIKASI STATUS DAERAH		- TIPOLOGI PERMASALAHAN DAERAH TERTENTU DITJEN PDTU KEMENDES PDDT	
		- TIPOLOGI PEMBANGUNAN DAERAH TERTENTU DITJEN PDTU KEMENDES PDDT	
		- LOKASI PRIORITAS PENANGANAN DAERAH PERBATAS BNPP	

	SUPER PRIORITAS
	PRIORITAS TINGGI
	PRIORITAS SEDANG
	PRIORITAS RENDAH

Kab. Kepulauan Talaud
(Prioritas Sedang)

Esri, Garmin, GEBCO, NOAA NGDC, and other contributors

Skema Intervensi Pengembangan DTu Berciri Kepulauan Berbasis Model Arhipolis

No	Skala Prioritas	Strategi Umum	Skema Intervensi Berbasis Masalah (Problem Based)			Skema Intervensi Berbasis Pembangunan (Development Based)		Pengembangan Kawasan Perbatasan
			Pengurangan Risiko Bencana	Pengurangan Kerawanan Pangan	Pengurangan Kerawanan Konflik Sosial	Peningkatan Aksesibilitas	Peningkatan Kualitas SDM	
1	Super Prioritas (SP)	Penguatan Kapasitas sumberdaya wilayah internal untuk menghadapi berbagai ancaman Berserta Infrastruktur Dasar Pendukungnya	Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Kemampuan Penanggulangan Secara Mandiri, serta Kapasitas Masyarakat dalam Beradaptasi terhadap Multihazard	Penyediaan Stok Cadangan Pangan Harus Berlebih, beserta sarpras pendukung, serta Melakukan Diversifikasi Pangan Lokal	Optimalisasi Sistem Sosial dan Budaya Masyarakat, serta aparat Negara dalam Pencegahan dan Penyelesaian konflik secara cepat dan terlokalisir	Penyediaan Moda Transportasi Reguler dan Cadangan, serta Diversifikasi Jalur antara Darat, Laut dan Udara, beserta teknologi komunikasi dan informasi dapat menjangkau wilayah ini	Penyediaan fasilitas dasar Pendidikan dan kesehatan, serta peningkatan skill untuk mengembangkan diversifikasi ekonomi	Peningkatan pada ketahanan masyarakat agar dapat mandiri di kawasan perbatasan (security aspect)
2	Prioritas Tinggi (PT)	Penanganan secara Tematik, serta Meningkatkan Kerjasama Penanganan dengan Wilayah Tetangga/ Terdekat	Pengembangan Sistem Pertolongan Pertama dan Komunikasi Bantuan dari Pihak Eksternal, serta Pengembangan Kerjasama Komunitas	Kerjasama Stok Cadangan Pangan dengan Wilayah Tetangga, serta Diversifikasi Pangan Lokal	Peningkatan Kapasitas Aktor Sosial dan Aparat Pemerintah, serta Kerjasama Penyelamatan Korban dengan Wilayah Tetangga	Pengembangan sarpras transportasi regular minimum pada jalur darat dan laut, dan terkoneksi ke daerah tetangga terdekat	Peningkatan kesadaran masyarakat serta partisipasi masyarakat dalam upaya meningkatkan kualitas SDM, khususnya dalam skala kawasan inter-region	Membuka peluang kerjasama pengembangan wilayah dengan wilayah tetangga

No	Skala Prioritas	Strategi Umum	Skema Intervensi Berbasis Masalah (<i>Problem Based</i>)			Skema Intervensi Berbasis Pembangunan (<i>Development Based</i>)		Pengembangan Kawasan Perbatasan
			Pengurangan Risiko Bencana	Pengurangan Kerawanan Pangan	Pengurangan Kerawanan Konflik Sosial	Peningkatan Aksesibilitas	Peningkatan Kualitas SDM	
			dengan Wilayah Tetangga					
3	Prioritas Sedang (PS)	Fokus Penanganan pada 1 Tema Masalah, serta penyiapan sumberdaya wilayah untuk maju	Pengurangan Risiko Bencana dengan Peningkatan Kapasitas dan Pengurangan Kerentanan Masyarakat	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pertanian untuk Diversifikasi Pangan Lokal	Pencegahan konflik sosial melalui penanganan sumber konflik yaitu identitas dan distribusi sumberdaya	Pengembangan sarpras non regular yang menjangkau wilayah ini	Peningkatan kapasitas SDM dalam memenuhi kebutuhan dasar secara berkelanjutan antar generasi	Menyiapkan sumberdaya di kawasan perbatasan untuk pengembangan perekonomian wilayah skala internasional
4	Prioritas Rendah (PR)	Potensial Pengembangan Pusat Pertumbuhan Baru, karena kesiapan sumberdaya wilayah	Pengendalian dan Pencegahan Penurunan Kualitas SDA, dalam rangka mendukung Pusat Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan	Optimalisasi Produk Pangan untuk Men-supply wilayah yang membutuhkan	Pengembangan modal sosial untuk mendukung pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi wilayah	Peningkatan Sarpras Transportasi skala massif untuk Mendukung Pengembangan Pusat Pertumbuhan ekonomi Baru	Mengoptimalkan potensi SDM untuk melakukan diversifikasi ekonomi untuk sektor tersier dan quaterner	Pembangunan kawasan perbatasan yang difokuskan untuk memunculkan pusat pertumbuhan baru skala lintas negara

KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD

Kab. Kepulauan Talaud masuk ke dalam
Kabupaten bercirikan “KEPULAUAN” (Archipolis)

1

KEC. MIANGAS

Jumlah Penduduk : 0,81 ribu
Luas Wilayah : 2,39 Km²
Jumlah Pulau : 2 Pulau

2

KEC. NANUSA

Jumlah Penduduk : 3,40 ribu
Luas Wilayah : 58,40 Km²
Jumlah Pulau : 7 Pulau

3

KEC. MELONGUANE

Jumlah Penduduk : 11,92 ribu
Luas Wilayah : 77,39 Km²
Jumlah Pulau : 1 Pulau

4

KEC. KABARUAN

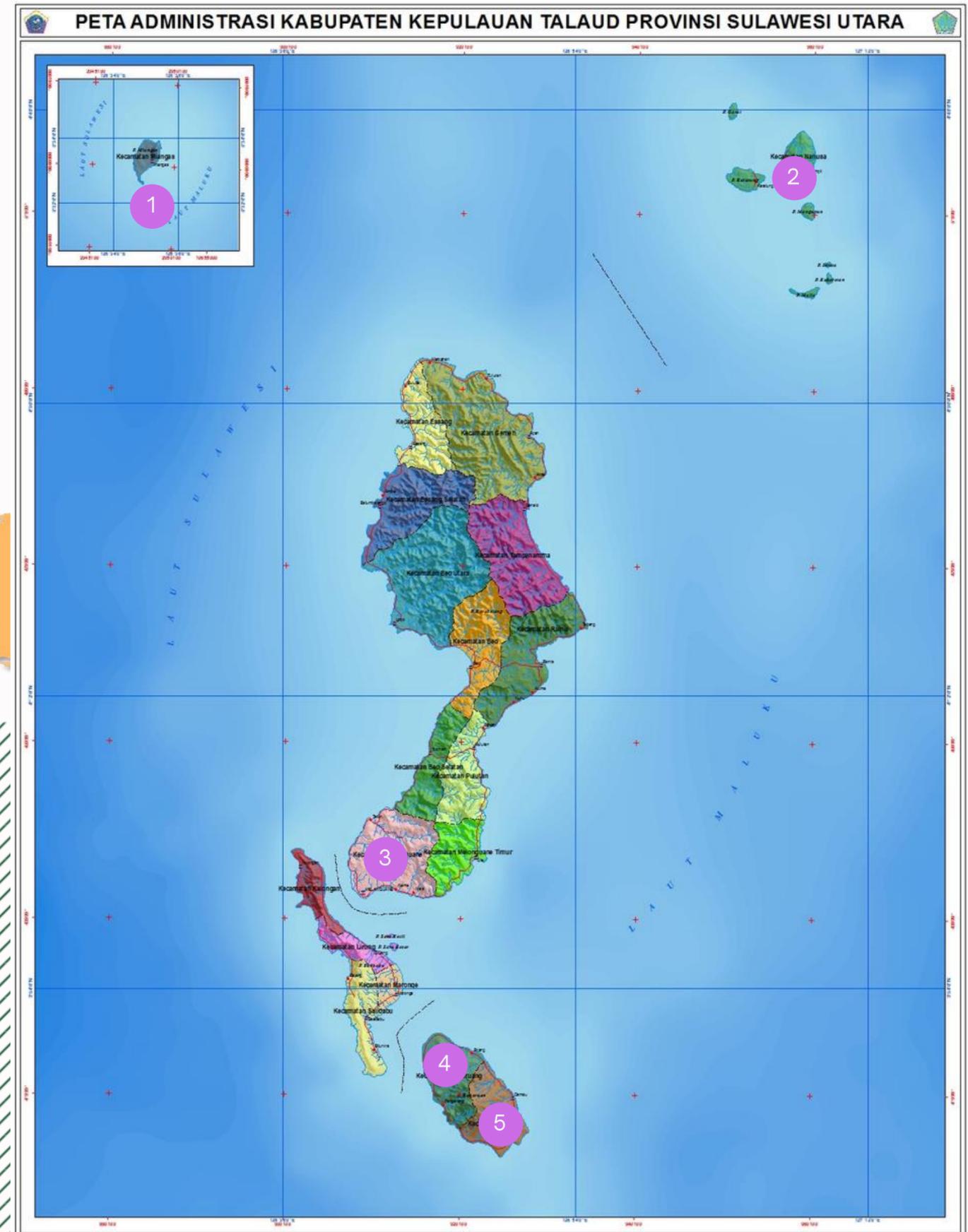
Jumlah Penduduk : 5,86 ribu
Luas Wilayah : 66,03 Km²
Jumlah Pulau : 2 Pulau

5

KEC. DAMAU

Jumlah Penduduk : 4,53 ribu
Luas Wilayah : 49,58 Km²
Jumlah Pulau : 1 Pulau

KECAMATAN PRIORITAS
(Sumber : Perpres No. 118 Tahun 2022)



Potensi Perikanan Tangkap Kab. Kep. Talaud



Desa Bisa

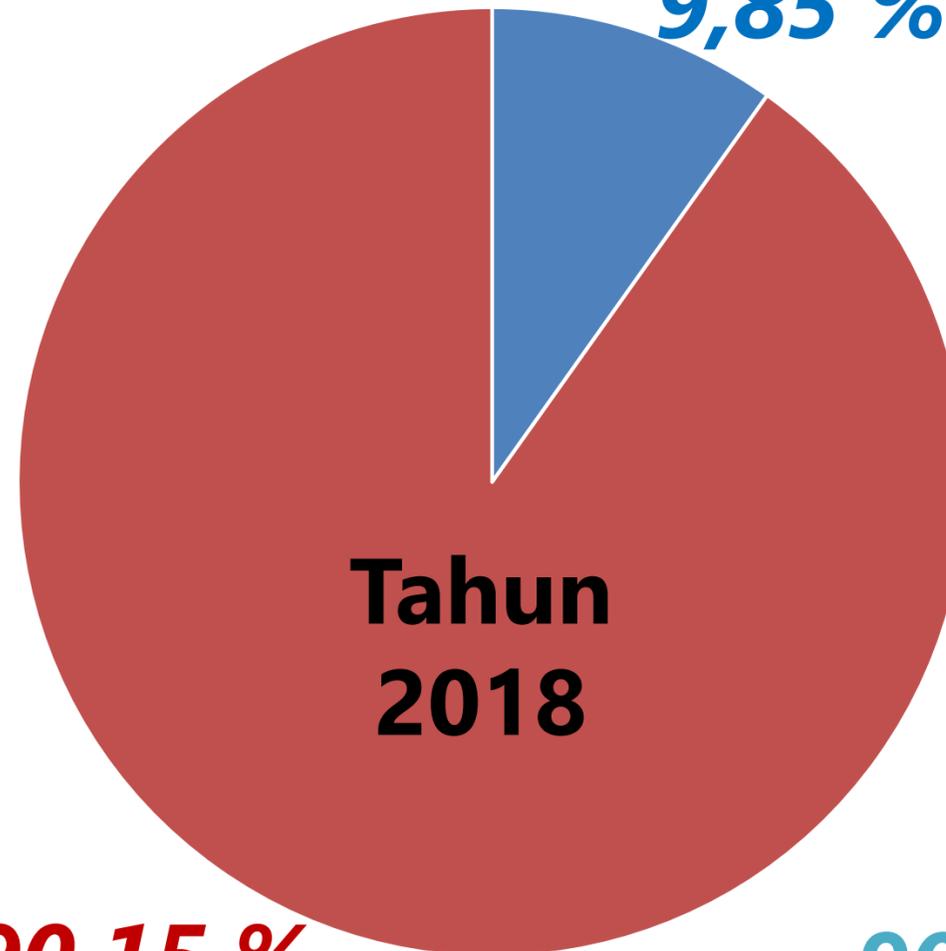


POTENSI
135.955
Ton / Tahun

■ **Potensi Perikanan Tangkap** sebesar 135.955 Ton/Tahun. Potensi terbesar berdasarkan jenis ikan yaitu **Tuna, Tongkol, Cakalang, dan Layang.**

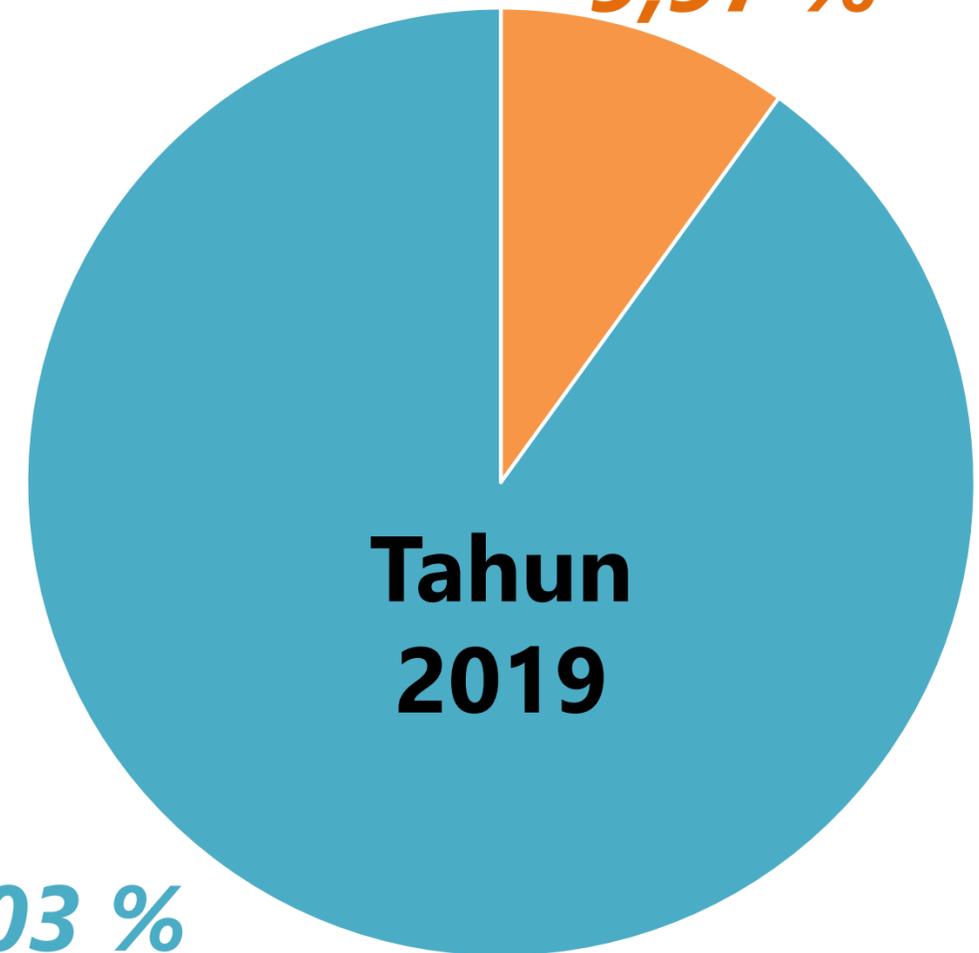
■ Tingkat pemanfaatan potensi perikanan di Talaud masih sangat **Kecil** dibandingkan dengan **potensi yang ada.**

Tingkat Pemanfaatan
9,85 %



**90,15 %
Cadangan Potensi**

Tingkat Pemanfaatan
9,97 %



**90,03 %
Cadangan Potensi**

Produksi Perikanan Tangkap Kab. Kep. Talaud



DesaBisa



Produksi tahun 2019
13.556
Ton

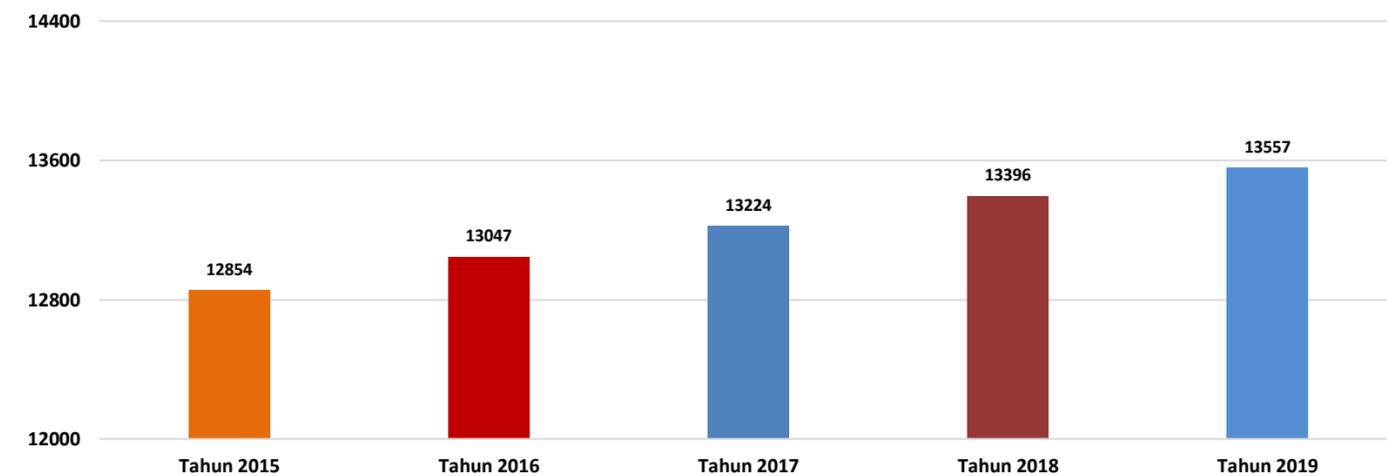
Produksi Perikanan Tangkap

pada tahun 2019 sebesar **13.556** ton, terdiri dari **ikan layang** sebesar 4.258 ton, **tuna sirip kuning** sebesar 3.175 ton dan **cakalang** sebesar 2.783 ton.

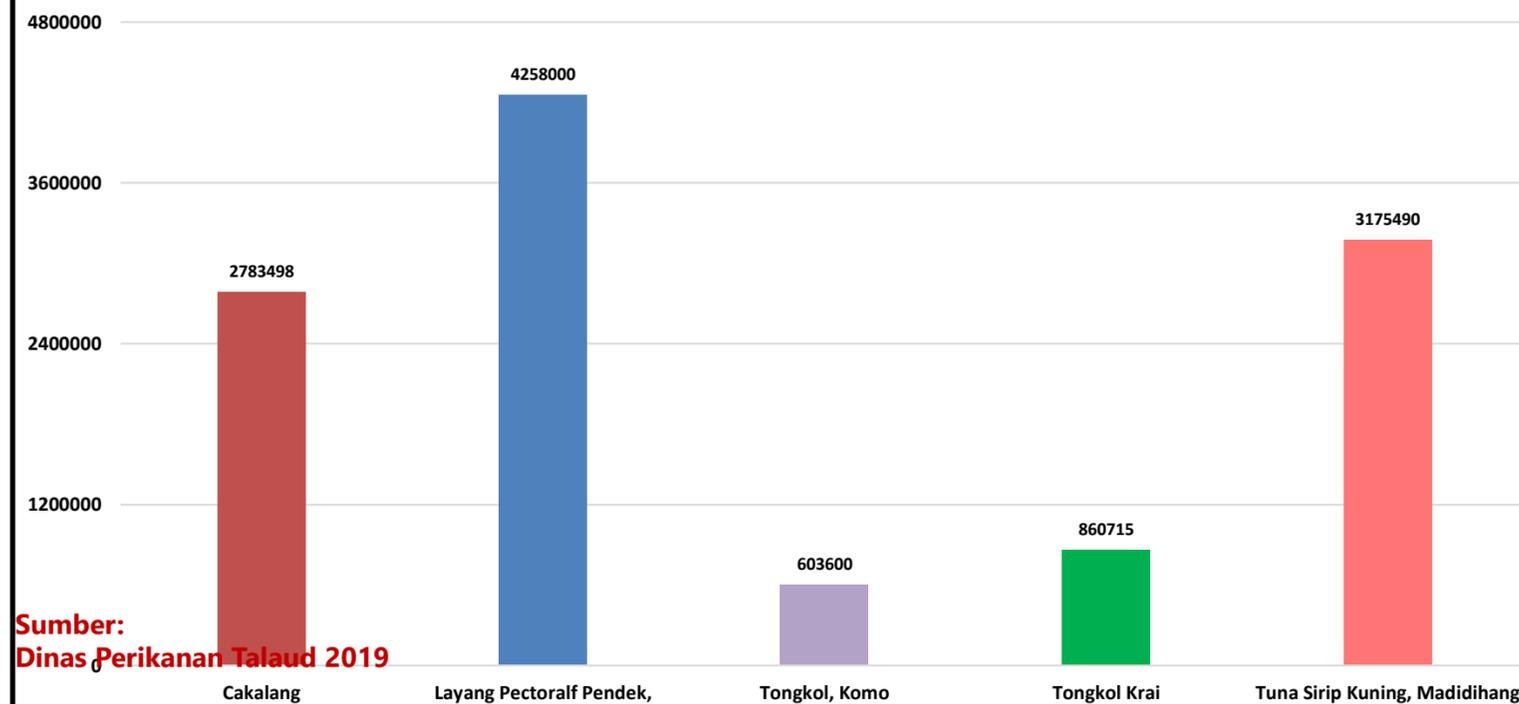


Pengiriman Ikan Tuna Sirip Kuning dengan tol laut

Produksi Perikanan Tangkap Tahun 2015 - 2019
(dalam ton)



5 Jenis Ikan dengan Produksi Terbanyak
Pada Produksi Perikanan Tangkap 2019 (kg)

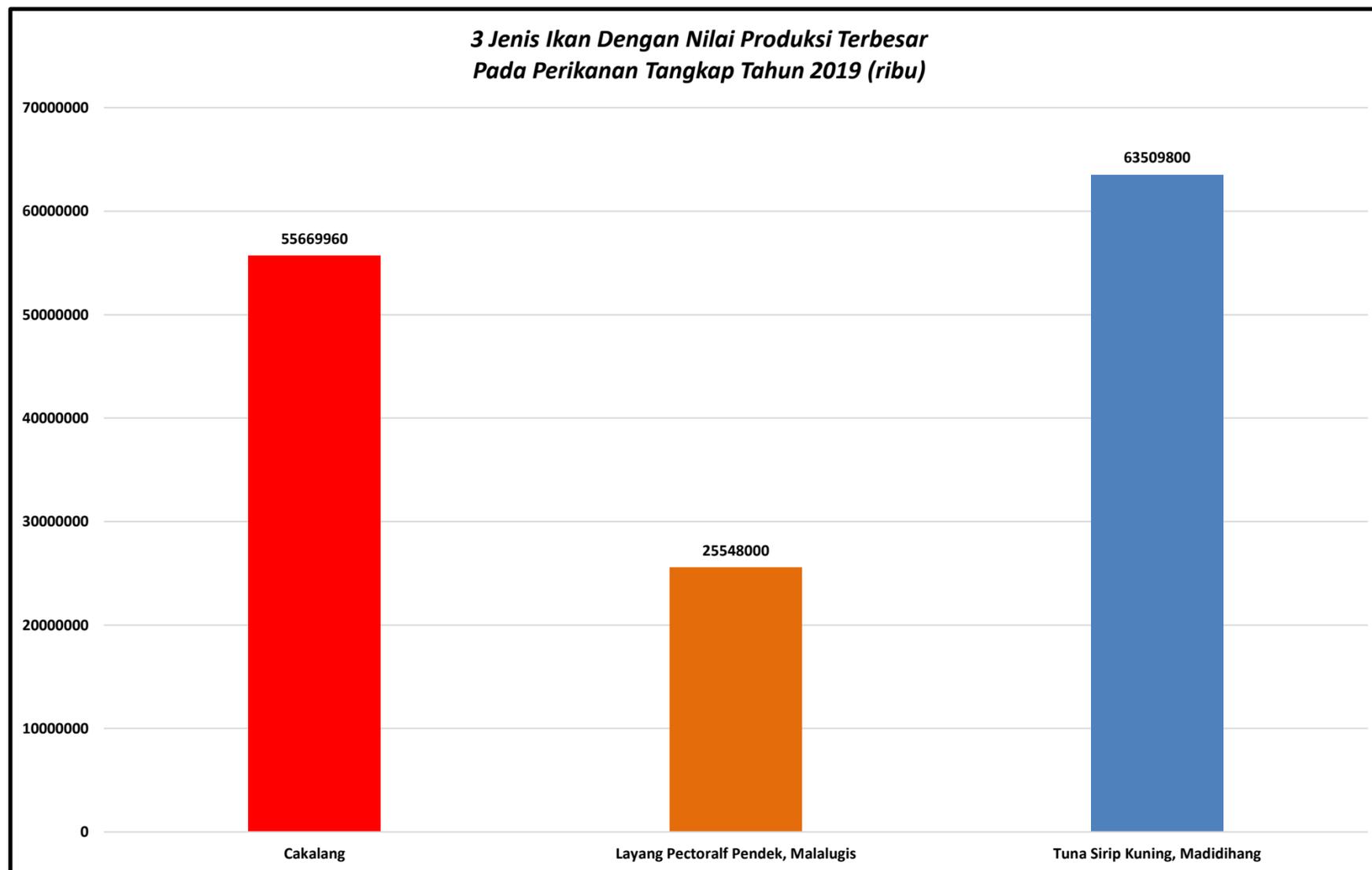


Sumber:
Dinas Perikanan Talaud 2019

Nilai Produksi Perikanan Tangkap Kab. Kep. Talaud



Desa **Bisa**



Sumber:
Dinas Perikanan Talaud 2019

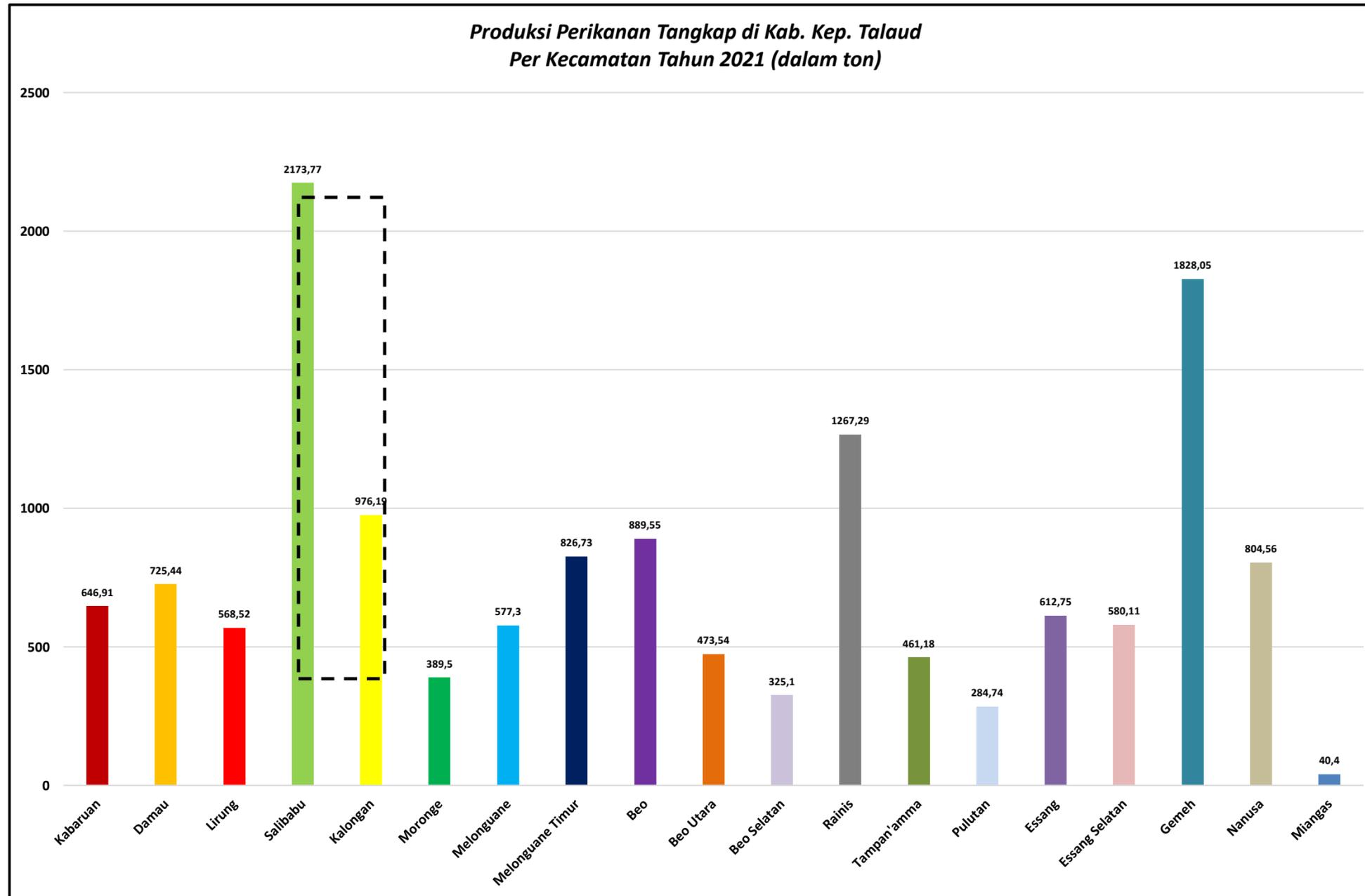
Nilai Produksi Perikanan Tangkap
Rp. 199.308.565.000,-

Nilai Produksi Perikanan Tangkap per jenis ikan tertinggi yaitu jenis ikan **Tuna Sirip Kuning** senilai Rp. 63.509.800.000,-, lalu **Cakalang** senilai Rp. 55.669.960.000,- dan **Ikan Layang** senilai Rp. 25.548.000.000,-



Ikan Cakalang yang memiliki nilai produksi kedua tertinggi di Kab. Kep. Talaud

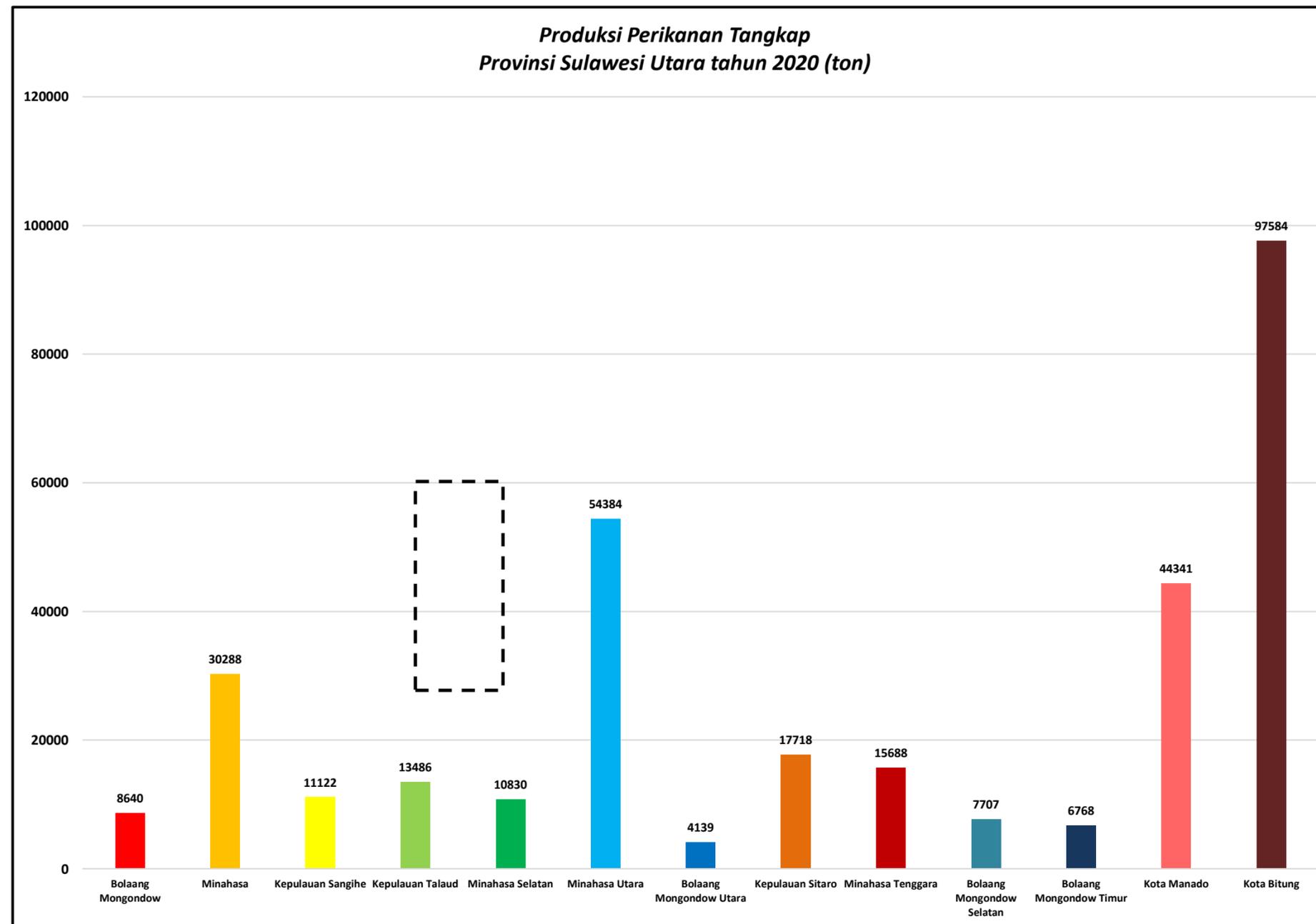
Produksi Perikanan Tangkap Kab. Kep. Talaud



Produksi Perikanan Tangkap tertinggi berada di **Kecamatan Salibabu** dengan produksi perikanan tangkap sebesar 2173,77 ton. Hal ini didukung oleh **Pelabuhan Pendaratan Ikan** yang digunakan untuk pusat penanganan dan pemasaran ikan hasil tangkapan.



Produksi Perikanan Tangkap Provinsi Sulawesi Utara



Produksi Perikanan Tangkap tertinggi di ***Provinsi Sulawesi Utara*** berada di Kota Bitung yang merupakan sentra penangkapan ikan tuna. ***Kabupaten Kep Talaud*** berada di urutan ke 7 dengan produksi sekitar 13.486 ton.

DAFTAR BUMDES DAN BUMDESMA DI KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD

- 1 BUMDESA SUKSES BERSAMA KARATUNG
(KEC.NANUSA)
- 2 BUMDESA MALOMBON TARA GEMEH
(KEC.GEMEH)
- 3 BUMDESA AMANIA PERET
(KEC. DAMAU)
- 4 BUMDESA SUKSES BERSAMA
KALONGAN SELATAN (KEC. KALONGAN)

- 5 BUMDESA FAJAR TATAPUAN
BOWOMBARU (KEC. MELONG-TIMUR)
- 6 BUMDESA TASELAEN MORONGE I
(KEC. MORONGE)
- 7 BUMDESA TOTOMBATU TAROHAN
SELATAN (KEC.BEO SELATAN)
- 8 BUMDESA BERSAMA MARUMAU
ALAHA LKD (KEC. GEMEH)
- 9 BUMDES TANJUNG WORA
(KEC. KHUSUS MIANGAS)

BELUM BERBADAN
HUKUM

NAMA TERVERIFIKASI	6/9
PERBAIKAN DOKUMEN	2/9
PENERIMA BANTUAN	2/9

CATATAN:
KEMENTERIAN DESA PDPT MELALUI **DITJEN PEID** TELAH MENYERAHKAN BANTUAN PENGEMBANGAN BUMDES KEPADA 2 BUMDES DI KEC. MELONGUANE TIMUR DAN KEC. MIANGAS (RP. 75 JUTA/BUMDES)



ISU-ISU PENGEMBANGAN PRODUK UNGGULAN

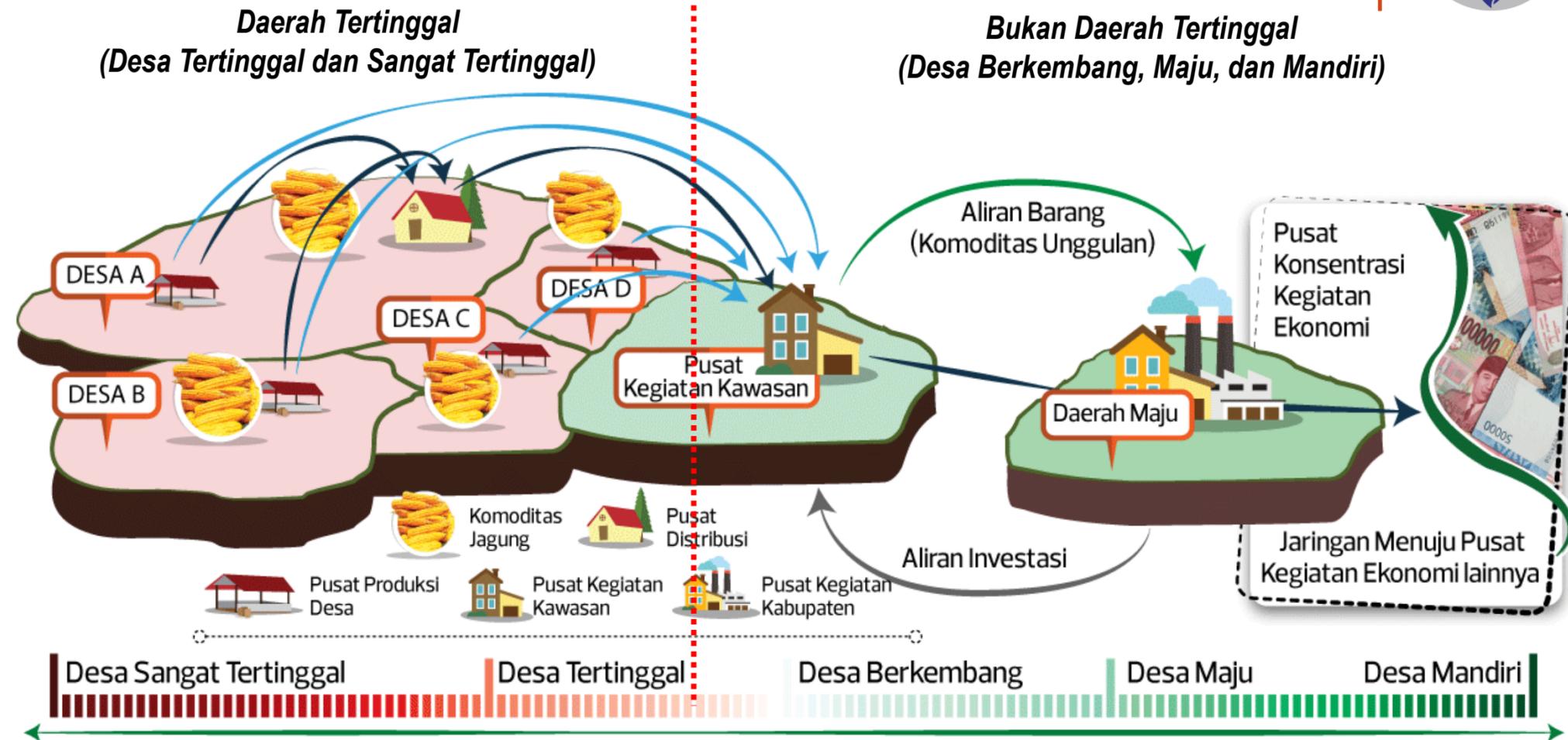


Masalah Ekonomi Desa :

1. Rendahnya skala ekonomi;
2. Lemahnya akses pasar;
3. Jalur distribusi yang panjang;
4. Rendahnya sarana pasca panen;
5. Kesulitan permodalan.

82,77%

penduduk desa bekerja di sektor pertanian



- Pengembangan produk unggulan perdesaan : Mengembangkan komoditas unggulan desa yang memenuhi skala ekonomi;
- Tujuannya adalah agar :

1. Pengelolaan lebih efisien
2. Investor dapat masuk
3. Biaya produksi dapat ditekan
4. Ada kepastian pasar
5. Menjaga stabilitas harga

- Diperlukan dukungan pihak swasta dalam penyediaan sarana dan prasarana pasca panen;
- Bagi pengusaha yang mau berinvestasi di Desa diharapkan diberikan insentif, seperti: kredit modal, pajak dan kemudahan perijinan;
- Untuk mendukung pengembangan produk unggulan perdesaan, perlunya difasilitasi pelaksanaan forum bisnis yang mempertemukan daerah dengan pihak investor dan Kementerian/Lembaga terkait.

